

DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP KINERJA SEKTOR PERTANIAN DI SULAWESI TENGGARA

(The Effect of Fiscal Policy Toward Agricultural Sector Performance in South East Sulawesi)

Hadi Sudarmo*)

ABSTRACT

The realization of APBD affects the amount of BP allocations. The amount of the allocation would be expected give effect to the agricultural sector by increasing PDRBP. If PDRBP increase, it also will give an increasing to the NTP. Ultimately NTP will give an increasing to APBD. APBD Shock in short term will get NTP decrease while PDRBP and TKP increase. Shock BP decreases TKP in the short term, increasing PDRBP and TKP. In the long term stabilizes PDRBP, increase TKP and decrease NTP. Result of PDRBP FEVD in the short and long term mostly determined BP and APBD. Absorption of TKP in short and long term mostly determined BP. Farmers Exchange in the short term is determined by APBD, while long-term determined BP and APBD. Therefore, BP and APBD are the effective policy in improving the performance of agricultural sector. In addition, the agricultural sector is determined by external factors such as other economic sectors.

Keywords: Fiscal, Agricultural Sector, Granger Causality, Impulse Response Function, Forecast Error Variance Decomposition

**Dosen Jurusan Agribisnis Universitas Halu Oleo*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kelangsungan hidup suatu daerah ataupun suatu bangsa. Hal ini sangatlah penting karena sektor pertanian menjadi penyedia bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat maupun menjadi bahan baku bagi industri. Disisi lain, pertanian menjadi sektor yang termarjinalkan yang identik dengan tingkat kesejahteraan masih tergolong rendah.

Sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama masyarakat Sulawesi Tenggara. Meskipun kecenderungannya jumlah tenaga kerja berfluktuatif namun sektor pertanian masih mendominasi. Jumlah kontribusi tenaga kerja tertinggi pada tahun 2008 sebesar 538.626 orang atau 58,22 persen dari seluruh sektor di Sulawesi Tenggara. Namun, tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 496.054 orang atau 49,62 persen. Sektor keuangan menjadi yang terendah dibandingkan sektor lain dengan kontribusi jumlah tenaga kerja tertinggi pada tahun 2009 sebesar 6.780 orang atau 0,71 persen. Pada tahun 2008 terendah yang bekerja di sektor keuangan sebesar 4.043 orang atau 0,44 persen.

Selain sebagai jumlah tenaga kerja tertinggi di Sulawesi Tenggara, sektor pertanian yang mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) jika dibandingkan dengan sektor lain. Periode waktu tahun 2008-2010 kontribusi PDRB sektor pertanian mendominasi di Sulawesi Tenggara jika dibandingkan dengan sektor lain meskipun mengalami penurunan. Kontribusi tertinggi PDRB sektor pertanian pada tahun 2009 sebesar Rp 8.985.344,89 atau 35,02 persen sedangkan terendah pada tahun 2010 sebesar Rp 9.419.178,11 atau 33,20 persen. Sektor listrik, gas dan air bersih memberikan kontribusi yang terendah jika dilihat dari kontribusi dari tahun 2008-2010

dengan nilai kontribusi tertinggi pada tahun 2009 sebesar Rp 237.690,01 atau 0,93 persen dan tahun 2010 sebesar Rp 262.556,68 atau 0,93 persen sedangkan yang terendah tahun 2008 sebesar Rp 69.556,67 atau 0,69 persen (BPS Sultra, 2011)

Oleh karena itu, sektor pertanian mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan perekonomian Sulawesi Tenggara karena mampu mengurangi tingkat pengangguran dan mempunyai kontribusi terbesar dalam peningkatan PDRB Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, peran sektor pertanian haruslah mendapat perhatian penting dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah agar pertanian bisa lebih maju dalam peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi.

Berdasarkan realisasi anggaran, pendapatan bidang kesehatan merupakan yang mempunyai kontribusi yang besar setelah pemerintahan umum yakni sebesar Rp 2.632.665.941 atau 2,495 persen sedangkan sektor pertanian hanya Rp 494.742.575 atau 0,05 persen (Biro Keuangan, 2011). Besarnya kontribusi ini diakibatkan kesehatan sangatlah penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

Berdasarkan fenomena tersebut maka diperlukan dampak kebijakan fiskal terhadap kinerja sektor pertanian di Sulawesi Tenggara. oleh karena itu mengkaji (1) bagaimana hubungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Belanja sektor pertanian, Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian dan Nilai Tukar Petani di Sulawesi Tenggara. (2) bagaimana respon perubahan kinerja sektor pertanian terhadap *shock* kebijakan fiskal di Sulawesi Tenggara. (3) instrumen kebijakan fiskal yang efektif dan menjadi faktor penentu kinerja sektor pertanian di Sulawesi Tenggara.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengkaji: (1) hubungan kausalitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Belanja sektor pertanian, Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian dan Nilai Tukar Petani di Sulawesi Tenggara, (2) respon perubahan kinerja sektor pertanian terhadap *shock* kebijakan fiskal di Sulawesi Tenggara, (3) instrumen kebijakan fiskal yang efektif dan menjadi faktor penentu kinerja sektor pertanian di Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya kebijakan fiskal terhadap sektor pertanian di Sulawesi Tenggara. juga diharapkan menjadi bahan informasi bagi yang berkecimpung di sektor pertanian, dan bahan pembanding dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini telah dilaksanakan di Sulawesi Tenggara pada bulan 2014. Menggunakan data *times series* dalam periode waktu 1987-2010. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. Data diperoleh

dari instansi tersebut di dokumentasikan yaitu mengambil data-data yang telah disediakan dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Pada proses pengolahan data sebelum menggunakan data yang ada maka terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan data dengan melakukan uji diagnostik. Uji tersebut meliputi uji stasioner dan kelambanan (*lag*). Setelah uji Kelambanan (*lag*), kemudian untuk menjawab rumusan masalah dilakukan uji: *Granger Causality*, estimasi *Vector Autoregressin* (VAR), *Impulse Respon Functions* (IRF) dan terakhir *Forcast Error Variance Decompotions* (FEVD). Pengolahan data tersebut menggunakan *software* EViews 4.1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kelayakan Data

1. Uji Stasioner

Hasil pengujian *unit root* ADF pada tingkat *first difference* (I (1)) seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan stasioner. Oleh karena itu, analisis data dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

2. Uji Kelambanan (*Lag*)

Lag optimal yang direkomendasikan oleh masing-masing kriteria berbeda antara satu (1) dan lainnya. *Likelihood Ratio* (LR) dan *Schwarz Information Criterion* (SIC) atau SC merekomendasikan *lag* satu sedangkan *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike Information Criterion* (AIC), dan *Hannan-Quinn Information Criterion* (HQIC) atau HQ merekomendasikan *lag* dua (2). Berdasarkan kelima kriteria tersebut maka uji *Granger Causality* dan model VAR yang dibangun menggunakan *lag* dua (2).

Analisis Hubungan Antara Variabel Kebijakan Fiskal dan Kinerja Sektor Pertanian

Tabel 1. Hasil *Granger Causality* (*lag* dua (2))

<i>Null Hypothesis:</i>	<i>F-statistic</i>	Probabilitas	Keterangan	
BP does not Granger Cause APBD	0,05627	0,94546	H ₀ diterima	Hubungan
APBD does not Granger Cause BP	9,28041	0,00189	H ₀ ditolak	Satu arah
PDRBP does not Granger Cause APBD	1,29478	0,29964	H ₀ diterima	Tidak ada
APBD does not Granger Cause PDRBP	0,66836	0,52551	H ₀ diterima	hubungan
NTP does not Granger Cause APBD	5,79794	0,01203	H ₀ ditolak	Hubungan
APBD does not Granger Cause NTP	1,71320	0,20998	H ₀ diterima	Satu arah
PDRBP does not Granger Cause BP	2,47290	0,11411	H ₀ diterima	Hubungan
BP does not Granger Cause PDRBP	5,69987	0,01275	H ₀ ditolak	Satu arah
NTP does not Granger Cause BP	1,46738	0,25830	H ₀ diterima	Tidak ada
BP does not Granger Cause NTP	1,54085	0,24267	H ₀ diterima	hubungan
NTP does not Granger Cause PDRBP	0,17318	0,84245	H ₀ diterima	Hubungan
PDRBP does not Granger Cause NTP	4,82975	0,02183	H ₀ ditolak	Satu arah

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa pada pengujian *Granger Causality* antara APBD dengan BP. Nilai probabilitas APBD dengan BP sebesar 0,00189 lebih kecil dari *critical value* (α) = 10 persen. Pengaruh APBD terhadap besarnya BP terjadi pada *lag* dua (2). Belanja sektor pertanian tidak

mempunyai hubungan dengan APBD karena nilai probabilitasnya (0,94546) lebih besar dari *critical value* (α) = 10 persen. Selain itu juga, Belanja sektor pertanian tidak mempengaruhi APBD Sulawesi Tenggara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah mampu memberikan pengaruh terhadap besarnya anggaran yang direalisasikan untuk belanja sektor pertanian. Adanya belanja yang memadai akan mampu menggerakkan sektor pertanian untuk terus meningkatkan produksinya sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PDRB sektor pertanian.

Produk Domestik Regional Bruto sektor pertanian dengan APBD tidak mempunyai hubungan. Hal ini dilihat dari nilai probabilitasnya lebih besar dari *critical value* (α) = 10 persen yakni 0,29964. Hubungan APBD dengan PDRB juga tidak memiliki hubungan karena nilai probabilitasnya lebih besar dari *critical value* (α) = 10 persen sebesar 0,52551. Selain itu juga, APBD dengan PDRB maupun PDRB dengan APBD tidak mempunyai pengaruh pada *lag* dua (2). Tidak adanya hubungan kedua variabel tersebut dikarenakan penganggaran APBD yang belum memberikan porsi yang besar pada belanja sektor pertanian terutama dalam penyediaan *input* petani sehingga berdampak pada PDRB.

Pengujian NTP dengan APBD mempunyai hubungan karena nilai probabilitasnya 0,01203 lebih kecil dari *critical value* (α) = 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa besaran NTP yang tidak mempunyai hubungan dengan APBD. Sedangkan APBD dengan NTP tidak mempunyai hubungan. Tidak adanya hubungan tersebut dikarenakan nilai probabilitasnya 0,20998 lebih besar dari *critical value* (α) = 10 persen. Nilai Tukar Petani mampu mempengaruhi APBD, jika petani sejahtera maka mempunyai kemampuan untuk membayar pajak yang akan memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD sebagai komponen utama dalam penerimaan APBD.

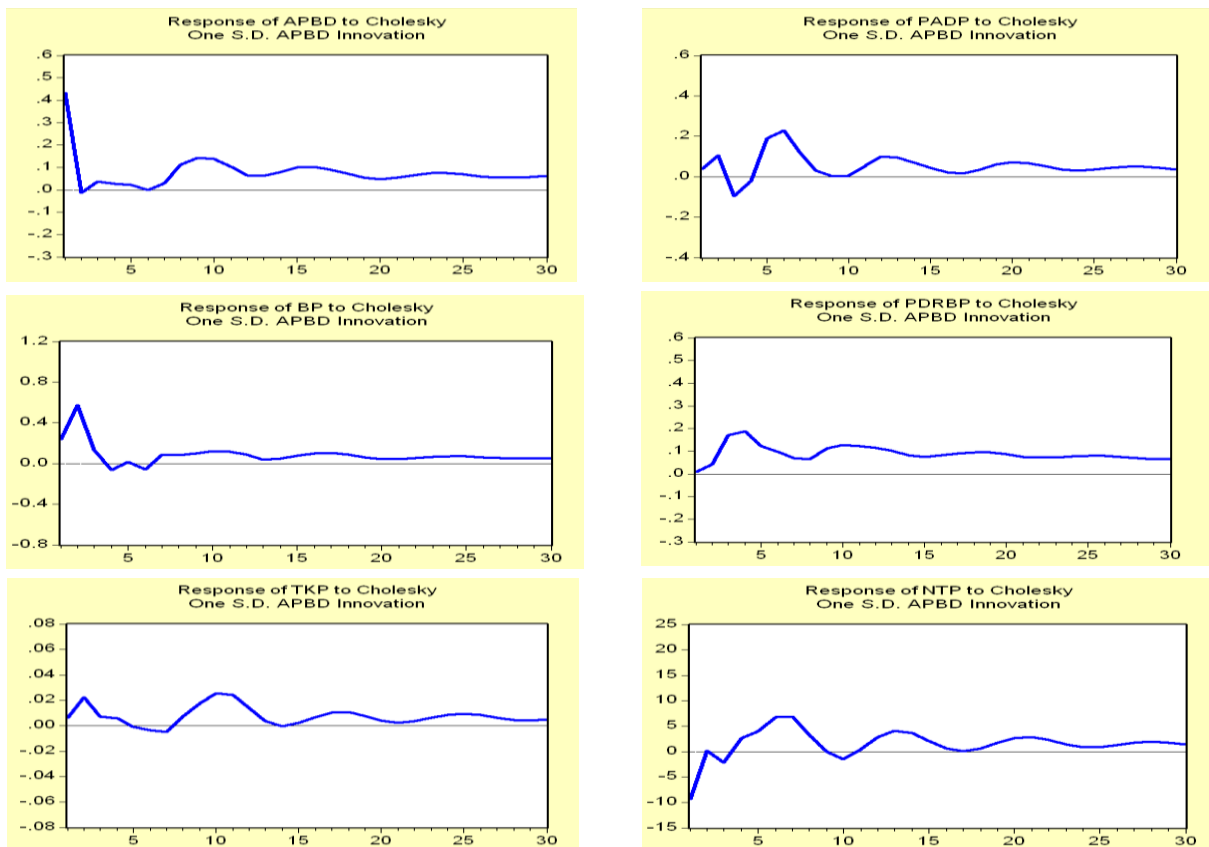
Pengujian PDRBP dengan BP tidak mempunyai hubungan karena nilai probabilitasnya 0,11411 lebih besar dari *critical value* (α) = 10 persen. Sebaliknya BP dengan PDRBP mempunyai hubungan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya 0,01275 yang lebih kecil dari *critical value* (α) = 10 persen. Hubungan BP dengan PDRBP berarti bahwa belanja sektor pertanian mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Pengujian NTP dengan BP tidak mempunyai hubungan. Hal ini ditandai probabilitasnya 0,25830 lebih besar dari *critical value* (α) = 10 persen. Begitu pula BP dengan NTP yang tidak mempunyai hubungan karena nilai probabilitasnya 0,24267 lebih besar dari *critical value* (α) = 10 persen. Tingkat kesejahteraan petani tidaklah menjadikan realisasi anggaran belanja sektor pertanian mengalami peningkatan dan belanja sektor pertanian tidak meningkatkan kesejahteraan petani. Jika belanja sektor pertanian hanya diarahkan pada belanja pegawai saja maka tidak akan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan petani.

Pengujian antara NTP dengan PDRBP menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara keduanya karena nilai probabilitasnya 0,84245 lebih besar dari *critical value* (α) = 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani belum mampu meningkatkan PDRB sektor pertanian. Sebaliknya, PDRBP mempunyai hubungan dengan NTP karena nilai probabilitasnya 0,02183 lebih kecil dari *critical value* (α) = 10 persen. Hubungan PDRBP dengan NTP tersebut diakibatkan besarnya nilai tambah sektor pertanian telah mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Sulawesi Tenggara. Nilai tambah tersebut memiliki dampak dalam peningkatan kemampuan petani dalam membayar *input* usahatani yang berkaitan dengan pendapatan petani.

Respon Kinerja Sektor Pertanian Terhadap *Shock* Kebijakan Fiskal

1. Respon Kinerja Sektor Pertanian Terhadap *Shock* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

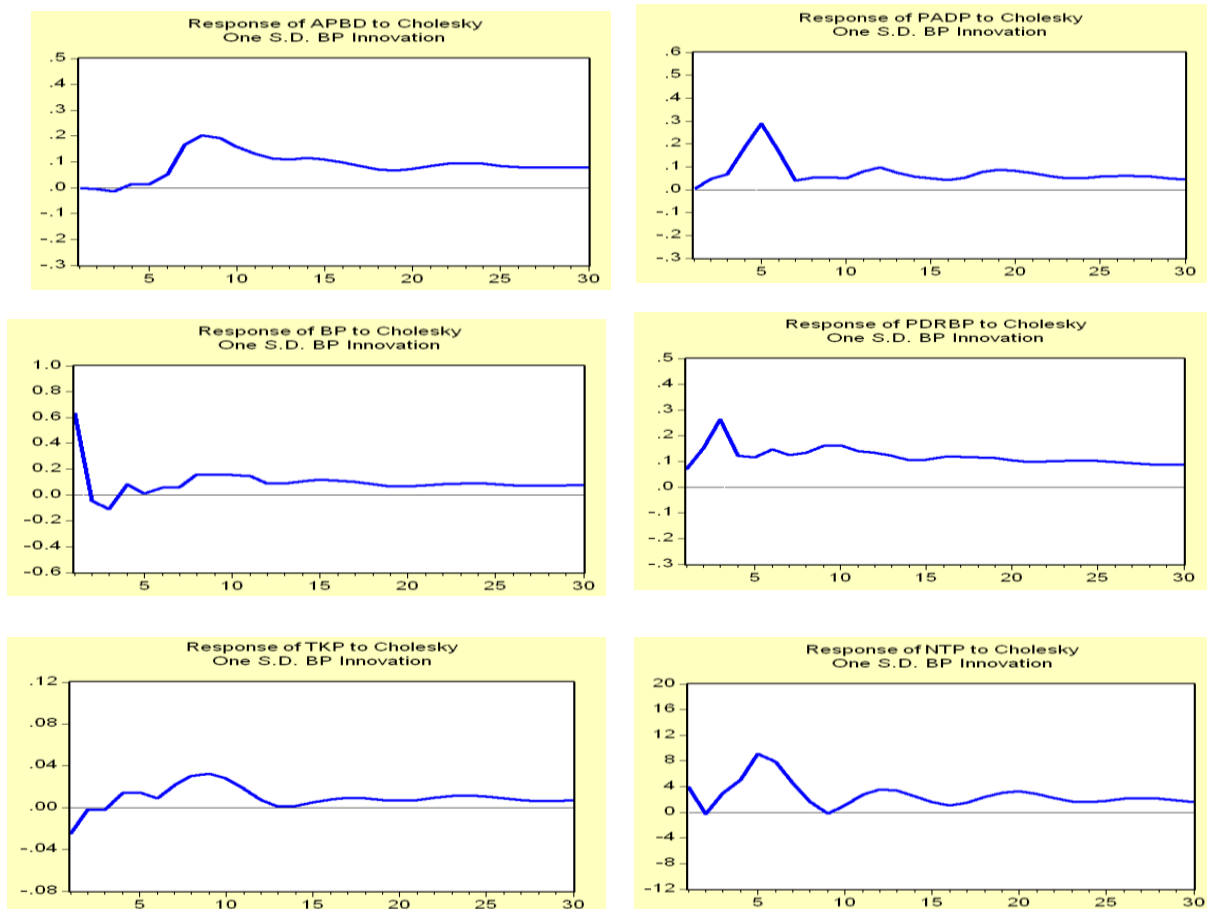


Pada jangka pendek peningkatan APBD sebesar 0,137 persen kembali menurunkan NTP kearah negatif (-1,497 persen) namun meningkatkan PDRBP dan TKP masing-masing 0,127 persen dan 0,026 persen. Peningkatan PDRBP dan TKP dapat meningkatkan PAD sektor pertanian (0,003 persen). Pengalokasian BP meningkat 0,120 persen belum mampu mendongkrak NTP. Peningkatan belanja sektor pertanian belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani karena banyaknya hama yang menyerang tanaman petani sehingga membutuhkan tambahan biaya untuk

memberantasnya. Terutama dalam membeli pestisida dan tenaga kerja untuk pemberantasan hama tersebut. Oleh karena itu, akan menyerap tenaga kerja di sektor pertanian.

Pada jangka panjang APBD meningkat 0,061 persen berdampak pada penurunan NTP diarah positif dan PDRBP masing-masing 1,364 persen dan 0,005 persen walaupun BP meningkat 0,056 persen. Peningkatan belanja sektor pertanian tidak memberikan dampak yang berarti jika tidak diarahkan pada belanja modal dan penyuluhan pertanian yang mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Akibat dari penurunan NTP dan PDRBP menurunkan PAD sektor pertanian menjadi 0,035 persen. Dampak dari variabilitas APBD justru meningkatkan TKP sebesar 0,064 persen. Peningkatan tersebut belum mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan peningkatan kinerja sektor pertanian lainnya. Merealisasikan APBD diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut haruslah mendapat perhatian dari pemerintah sehingga sektor pertanian mampu menyediakan lapangan kerja yang luas. Jika kesejahteraan meningkat maka akan mendorong petani untuk tidak beralih pada usaha lain.

2. Respon Kinerja Sektor Pertanian Terhadap *Shock* Belanja Sektor Pertanian (BP)



Pada jangka pendek BP memberikan dampak yang berfluktuasi pada PDRBP, TKP, dan NTP. Respon PDRBP memberikan respon yang positif dengan nilai tertinggi 0,028 persen dan terendahnya 0,069 persen. Respon TKP dan NTP mencapai nilai terendah masing-masing -0,025 persen dan -0,259 persen sedangkan respon tertinggi keduanya masing-masing mencapai 0,033 persen dan 9,084 persen. Besarnya fluktuasi kinerja sektor pertanian tidak terlepas dari besarnya belanja sektor pertanian sebagai bentuk pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah sangat bervariasi namun secara garis besar dapat diklasifikasikan kedalam empat jenis (1) pengeluaran untuk investasi yang memperkuat ketahanan ekonomi di masa mendatang, (2) pengeluaran untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, (3) pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran yang dilakukan masa mendatang, (4) pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menyebabkan daya beli luas (Adisasmita, 2011).

Respon PDRBP stabil sebesar 0,086 persen sedangkan TKP meningkat 0,007 persen dan NTP menurun 1,555 persen sebagai dampak dari peningkatan BP sebesar 0,076 persen pada tahun ketiga puluh. Besarnya alokasi belanja sektor pertanian dipengaruhi oleh besarnya APBD. Alokasi tersebut dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang diakibatkan oleh penambahan areal lahan pertanian ataupun diversifikasi produk pertanian. Kestabilan PDRBP, dan penurunan NTP memberikan penurunan pada PADP (0,045 persen) sedangkan APBD mengalami penurunan. Pada jangka panjang guncangan BP berdampak pada kestabilan PDRBP sedangkan TKP dan NTP mengalami fluktuatif yang positif.

Faktor Penentu Kinerja Sektor Pertanian

1. Faktor Penentu Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian (PDRBP)

Tabel 2. Faktor Penentu Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian

Tahun	Persentase (%)					
	APBD	PADP	BP	PDRBP	TKP	NTP
1	0,09	22,17	5,62	72,11	0	0
10	17,88	13,39	32,47	29,67	4,47	2,12
20	19,81	13,06	33,69	28,09	3,22	2,13
30	20,02	13,15	34,16	27,82	2,74	2,10

Variabilitas PDRBP sebagian besar ditentukan oleh variabilitas PDRBP itu sendiri 72,11 persen tidak mampu dijelaskan oleh variabilitas TKP dan NTP sedangkan PADP memberikan kontribusi 22,17 persen dan 5,62 persen. Variabilitas APBD mempunyai kontribusi yang relatif kecil 0,09 persen. Pada jangka pendek (periode sepuluh) variabilitas PDRBP mengalami penurunan 29,67 persen yang diikuti dengan penurunan variabilitas PADP 13,39 persen sedangkan guncangan

BP meningkat 32,47 persen dan guncangan APBD meningkat 17,88 persen. Guncangan TKP dan NTP relatif kecil masing-masing 4,47 persen dan 2,12 persen.

Pada jangka menengah variabilitas PDRBP dapat dijelaskan oleh guncangan BP 33,69 persen, dan APBD 19,81 persen sedangkan PADP mengalami penurunan 13,06 persen. Guncangan TKP dan NTP memberikan kontribusi yang kecil masing-masing 3,22 persen dan 2,13 persen. Dalam angka panjang guncangan BP tetap mendominasi 34,16 persen, APBD 20,02 persen, dan PADP 13,15 persen. Guncangan TKP dan NTP tetap memberikan kontribusi yang rendah masing-masing 2,74 persen dan 2,10 persen. Kebijakan fiskal dengan instrumen BP, APBD dan PADP memberikan kontribusi yang besar dalam penentuan variabilitas PDRBP. Berdasarkan ketiga instrumen tersebut BP mempunyai kontribusi yang besar.

Sulawesi Tenggara merupakan daerah agraris yang masih banyak menyimpan potensi untuk peningkatan sektor pertanian sehingga masih mempunyai kontribusi PDRB yang lebih besar dibandingkan dengan sektor lain seperti industri pengolahan dan jasa. Syafrizal (1997) mengatakan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan untuk dapat dikembangkan sehingga mendorong kenaikan PDRB bagi daerah yang bersangkutan.

2. Faktor Penentu Tenaga Kerja Sektor Pertanian (TKP)

Variabilitas PDRBP sebagian besar ditentukan oleh variabilitas PDRBP itu sendiri 72,11 persen tidak mampu dijelaskan oleh variabilitas TKP dan NTP sedangkan PADP memberikan kontribusi 22,17 persen dan 5,62 persen. Variabilitas APBD mempunyai kontribusi yang relatif kecil 0,09 persen. Pada jangka pendek (tahun kesepuluh), variabilitas PDRBP mengalami penurunan 29,67 persen yang diikuti dengan penurunan variabilitas PADP 13,39 persen sebagai akibat dari peningkatan variabilitas APBD dan BP masing-masing 17,88 persen dan 32,47 persen. Variabilitas TKP dan NTP memberikan kontribusi yang relatif kecil masing-masing 4,47 persen dan 2,12 persen terhadap PDRBP. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi APBD berdampak pada peningkatan BP. Oleh karena itu, APBD dan BP memberikan kontribusi yang besar pada PDRB sektor pertanian.

Pada jangka menengah variabilitas PDRBP dapat dijelaskan oleh variabilitas BP 33,69 persen, dan APBD 19,81 persen sedangkan PADP mengalami penurunan 13,06 persen. Variabilitas TKP dan NTP memberikan kontribusi yang kecil masing-masing 3,22 persen dan 2,13 persen. Pada jangka panjang variabilitas BP tetap mendominasi 34,16 persen, APBD 20,02 persen, dan PADP 13,15 persen. Variabilitas TKP dan NTP tetap memberikan kontribusi yang rendah masing-masing 2,74 persen dan 2,10 persen. Kebijakan fiskal dengan instrumen BP, APBD dan PADP memberikan

kontribusi yang besar dalam penentuan variabilitas PDRBP. Berdasarkan ketiga instrumen tersebut BP mempunyai kontribusi yang besar.

Tabel 3. Faktor Penentu Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Tahun	Persentase (%)					
	APBD	PADP	BP	PDRBP	TKP	NTP
1	0,76	0,17	12,19	0,78	86,10	0
10	6,25	9,17	15,97	15,42	51,54	1,65
20	9,26	8,68	16,43	14,88	48,98	1,77
30	9,86	8,99	17,73	15,71	45,95	1,75

Salah satu ciri sektor pertanian adalah bahwa banyaknya penggunaan tenaga kerja manusia sedangkan penggunaan tenaga kerja mesin relatif sedikit. Pada usahatani sempit, penggunaan tenaga kerja keluarga relatif besar. Terkadang pula penggunaan tenaga kerja bersifat musiman dalam arti bahwa jumlah tenaga kerja pada kurun waktu tertentu yang sedikit sehingga penggunaan tenaga kerja tersebut berbeda untuk setiap kegiatan pertanian pada musim tertentu (Soekartawi, 2002). Fenomena tersebut menjadi masalah klasik yang terus dialami pada sektor pertanian. Oleh karena itu, adanya belanja sektor pertanian yang dianggarkan dan direalisasikan diarahkan pada penguasaan teknologi pertanian maka akan mampu mengurai masalah tersebut.

Belanja sektor pertanian masih memberikan pengaruh yang besar dalam penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Hal ini diakibatkan oleh belanja pertanian yang mengarah pada peningkatan kualitas produk pertanian akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar disektor pertanian. Samuelson dan Nordhaus (2004) mengatakan bahwa pelajaran dekade-dekade usaha untuk mengakselerasi industrialisasi dengan mengorbankan bidang pertanian telah banyak membawa banyak analis untuk memikirkan kembali peran pertanian. industrialisasi bersifat padat modal, menarik para pekerja untuk memenuhi perkotaan, dan seringkali mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Meningkatkan produktivitas pertanian mungkin membutuhkan lebih sedikit modal, namun menyediakan lapangan kerja produktif bagi kelebihan tenaga kerja.

Kunci membangun kembali sektor pertanian di daerah pasca “revolusi hijau” adalah meningkatkan produktivitas pertanian melalui: (1) pembangunan infrastruktur dan perubahan teknologi yang terus menerus dikombinasikan dengan (2) industrialisasi pertanian dengan penekanan pembangunan agroindustri, (3) membangun industrialisasi pertanian yang mampu menggunakan tenaga kerja pedesaan, (4) membuka kembali akses petani terhadap lahan pertanian *via agrarian reform* atau penjualan (sistem sewa) tanah yang telah disiapkan kepada petani dengan sistem kredit, dan (5) memperkuat posisi petani skala kecil melalui organisasi yang bersifat vertikal dimana petani tinggal memilih pengusaha dalam sistem koperasi atau usaha bersama (Tambunan, 2010).

Sebuah gambaran umum dari semua pertanian modern adalah fokusnya pada salah satu jenis tanaman tertentu, menggunakan intensifikasi modal dan pada umumnya memproduksi dengan teknologi yang hemat tenaga kerja serta memperhatikan skala ekonomis yang efisien (*economics of scale*) yaitu dengan cara meminimumkan biaya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Untuk mencapai semua tujuan, pertanian modern praktis tidak berbeda dalam konsep atau operasinya dengan perusahaan industri yang besar sistem pertanian modern yang dominan itu sekarang dikenal dengan istilah agribisnis (Arsyad, 2010).

3. Faktor Penentu Nilai Tukar Petani (NTP)

Variabilitas NTP dalam jangka pendek ditentukan oleh APBD 23,93 persen, dan BP 23,34 persen yang diikuti PDRBP 11,75 persen, dan TKP 10,48 persen. Pada jangka menengah ditentukan oleh variabilitas BP 24,55 persen yang meningkat melebihi kontribusi APBD 23,78 persen. Guncangan PDRBP, TKP dan PADP ikut memberikan kontribusi masing-masing 22,63 persen, 11,39 persen, dan 10,31 persen.

Pada jangka panjang variabilitas NTP kembali ditentukan oleh BP 25,50 persen, dan APBD 24,02 persen yang diikuti dengan kontribusi PDRBP, TKP, dan PADP masing-masing, 22,61 persen, 10,59 persen, dan 10,39 persen. Jika dilihat dari kontribusi yang diberikan maka kebijakan fiskal yang memberikan kontribusi yang besar dan konsisten terhadap variabilitas NTP adalah BP dan APBD.

Tabel 4. Faktor Penentu Nilai Tukar Petani Sektor Pertanian

Tahun	Persentase (%)					
	APBD	PADP	BP	PDRBP	TKP	NTP
1	50,91	0,78	8,78	0,01	0,35	39,17
10	23,93	10,48	23,34	21,77	11,75	8,73
20	23,78	10,31	24,55	22,63	11,39	7,33
30	24,02	10,39	25,50	22,61	10,59	6,89

Upaya peningkatan kesejahteraan petani dapat dilakukan pemerintah melalui kebijakan anggaran berupa belanja sektor pertanian yang diarahkan pada peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi yang digunakan sehingga mampu memberikan peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Selain itu juga, mampu meningkatkan daya beli petani yang akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di Sulawesi Tenggara. Selain itu juga, tingkat kesejahteraan petani ditopang oleh keadaan eksternal sektor pertanian misalnya kebijakan fiskal yang berasal dari sumber-sumber ekonomi lain berupa realisasi APBD.

Berdasarkan besarnya kontribusi APBD dan BP terhadap kinerja sektor pertanian yang terus mengalami peningkatan pada jangka pendek, menengah, dan panjang. Oleh karena itu dapat

dikatakan APBD dan BP merupakan kebijakan fiskal yang efektif dalam peningkatan kinerja sektor pertanian.

Pengelolaan belanja daerah ada enam prinsip (Adisasmita, 2011):

1. Kriteria dalam pemilihan program yang akan dilaksanakan dengan yang akan dibiayai dengan pendapatan daerah diupayakan tidak mengandung unsure penjaminan. Jaminan keamanan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan.
2. Jumlah pengeluaran secara total dari semua unit kerja harus mendukung kebijakan makro ekonomi.
3. Arah pengeluaran anggaran antara unit dalam berbagai jenis pengeluaran adalah peningkatan kesejahteraan.
4. Implikasi dari program-program kunci pada kelompok miskin harus dianalisis dengan baik.
5. Alokasi dana untuk belanja rutin dan belanja pembangunan dalam setiap program harus dianalisis dengan terintegrasi.
6. Lembaga yang terlibat didalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu dianalisis.

Usaha pembangunan sektor pertanian diarahkan pada taraf hidup para petani yang bersangkutan. Disamping usaha peningkatan taraf hidup masyarakat petani, sasaran lain dari pembangunan sektor pertanian adalah penambahan penerimaan negara melalui ekspor hasil – hasil pertanian, serta untuk mencapai tingkat mandiri dibidang pemuasan kebutuhan masyarakat banyak (Sondang, 1988).

Masalah pengembangan dan pembinaan sudah amat banyak dipersoalkan bahkan juga diangani oleh banyak pihak yaitu oleh Departemen-departemen, perbankan maupun oleh mahasiswa dikalangan perguruan tinggi. Namun mengapa pada hakekatnya tidak mengena sasaran?. Oleh karena itu masih dianggap perlu untuk (mengidentifikasi dari hal apakah atau dari segi manakah petani kecil harus mendapat bantuan yang nyata. Pihak petani kecil berpendapat bahwa mereka butuhkan adalah modal, baik itu berupa lahan untuk diolahnya maupun modal uang sebagai sarana untuk dipergunakan dalam pengolahannya (Sastratmadja, 1986).

Pembangunan pedesaan terutama sekali masih tergantung pada kemajuan para petani kecil. Kemajuan tersebut meliputi: (1) perbaikan taraf hidup, termasuk pendapatan, pendidikan, kesehatan atau nutrisi perumahan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan jaminan sosial (2) mengurangi ketimpangan pemerataan pendapatan dipedesaan dari ketimpangan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan serta kesempatan-kesempatan berusaha (3) perbaikan kapasitas sektor pedesaan dari waktu ke waktu (Arsyad, 2010).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Empat kesimpulan dalam penelitian ini: (1) realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berhubungan dengan besarnya alokasi belanja sektor pertanian. Besarnya alokasi tersebut maka akan mampu memberikan efek pada sektor pertanian berupa peningkatan produk domestik regional bruto sektor pertanian. Jika produk domestik regional bruto sektor pertanian mengalami peningkatan maka akan meningkatkan nilai tukar petani. Pada akhirnya akan memberikan kontribusi dalam peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah, (2) skenario peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada jangka pendek hanya mampu meningkatkan produk domestik bruto sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Skenario peningkatan belanja sektor pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan produk domestik regional bruto sektor pertanian namun mengurangi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, (3) skenario peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada jangka panjang hanya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja namun menurunkan kesejahteraan petani dan produk domestik regional bruto sektor pertanian. Skenario peningkatan belanja sektor pertanian belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani namun meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menstabilkan produk domestik regional bruto sektor pertanian, (4) kinerja produk domestik regional bruto sektor pertanian, tenaga kerja sektor pertanian dan nilai tukar petani ditentukan oleh besaran anggaran pendapatan belanja daerah dan alokasi belanja sektor pertanian. Selain itu juga, besaran anggaran pendapatan belanja daerah dan alokasi belanja sektor pertanian menjadi kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kinerja produk domestik regional bruto sektor pertanian, tenaga kerja sektor pertanian dan nilai tukar petani. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian ditentukan oleh faktor eksternal diluar pertanian yakni peningkatan kebijakan fiskal daerah.

Saran

Peningkatan besaran anggaran pendapatan dan belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan besarnya realisasi belanja sektor pertanian. Realisasi belanja sektor pertanian dalam bentuk penyediaan *input* pertanian terutama dalam hal pemanfaatan teknologi pertanian. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian agar tercapai peningkatan kesejahteraan petani. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel kebijakan fiskal di luar sektor pertanian misalnya pendapatan asli daerah dan belanja. Selain itu juga, menambahkan kinerja sektor di luar sektor pertanian misalnya produk domestik bruto, dan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arsyad, L, 2010. *Ekonomi Pembangunan Edisi Lima*. STIM YKPN, Yogyakarta.
- Biro Keuangan Sultra, 2011. *Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2010*. Biro Keuangan Setda Sultra, Kendari.
- BPS Sultra, 2011. *Berita Resmi Statistik*. BPS Sulawesi Tenggara.
- Sastraatmadja, E, 1986. *Indikator-Indikator Perekonomian Indonesia*. Armico, Bandung.
- Soekartawi, 2002. *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian; Teori dan Aplikasinya*. Raja Grafindo Persada. Edisi Revisi, Jakarta.
- Sondang, S.P, 1988. *Proses Pengolahan Pembangunan Nasional*. CV Haji Masagung, Surabaya.
- Syafrizal, 1997, *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma, Volume 3, 27-38,
- Tambunan, M, 2010. *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan Menggerakkan Kekuatan Lokal dalam Globalisasi Ekonomi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.